

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Dugaan Korupsi PT ASABRI

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap enam orang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

"Memeriksa enam orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan tindak pidana korupsi pada PT. AS-ABRI," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simajuntak dalam keterangannya, Jakarta, Senin (12/4).

Adapun ke enam saksi itu adalah, YN selaku Direktur PT. Hanson Coal Energy, RS selaku Direktur PT. Oso Management Investasi, C selaku Nominee Tersangka BTS, GJ selaku Direktur PT. Bintang Baja Hitam, YG selaku Karyawan PT. Asabri dan BS selaku Staf Administrasi PT. Asabri.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT. ASABRI," ujar Leonard.

Sekadar informasi, sejauh ini Jampidsus Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri.

Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode tahun 2011-Maret 2016 Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016-Juli 2020; Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014; Bachtiar Effendi, Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019; Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017 Ilham W Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomo-sidi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KKP TANGKAP LIMA KAPAL IKAN BERBENDERA VIETNAM

Sejumlah petugas bersiaga di kapal ikan ilegal berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (12/4). Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap lima kapal ikan asing berbendera Vietnam beserta 28 Anak Buah Kapal (ABK) saat sedang menangkap cumi-cumi secara ilegal di kawasan Laut Natuna Utara pada Kamis (8/4/2021).

Kepuasan Publik Terhadap Ma'ruf Amin Lebih Rendah Dibandingkan Jokowi

Jubir mengatakan Wapres Ma'ruf lebih banyak melakukan langkah-langkah koordinasi yang diminta Presiden Jokowi. Dengan demikian, hasil survei itu menurutnya tidak menjadi masalah bagi Wapres.

JAKARTA (IM) - Berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO), kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Wendah Ma'ruf Amin lebih rendah dibandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam survei yang dirilis IPO, kepuasan publik terhadap wapres hanya 36%, sementara presiden sebesar 56%. Terkait hal tersebut, Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi menilai hasil tersebut bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

"Kalau surveinya justru Pak Wapres di atas Pak Jokowi malah bingung kita. Jadi kalau wapres di bawah presiden ya biasa. Namanya ban serep di mana-mana kadang dipakai kadang enggak dipakai. Namanya ban serep kan," katanya dalam konferensi persnya, Senin (12/4).

Dia menilai untuk tidak terlalu serius dengan survei-survei seperti itu. Menurutnya posisi wapres di bawah presiden adalah wajar.

"Jadi jangan terlalu serius dengan survei-survei yang

memang diagendakan dengan agenda tertentu, untuk pencitraan tertentu oleh penyelenggaranya. Apabila wapres posisinya seperti itu saya kira wajar," ucapnya.

Masduki mengatakan, pihak wapres tidak bermasalah dengan hasil survei tersebut. Menurutnya wapres tetap bekerja seperti biasanya.

"Saya kira kami sebagai jubir tak ada masalah dengan survei seperti itu. Wakil tetap konsen bekerja dan nyaman," ungkapnya.

Masduki Baidlowi mengatakan bahwa gaya kepemimpinan setiap wapres berbeda-beda dan tidak bisa disamakan.

"Style setiap Wapres berbeda-beda, tidak bisa sama," katanya.

Masduki mengatakan, Wapres Ma'ruf sendiri lebih banyak melakukan langkah-langkah koordinasi yang diminta Pres-

iden Jokowi. Dengan demikian, hasil survei itu menurutnya tidak menjadi masalah bagi Wapres Ma'ruf Amin, terlebih karena posisi Ma'ruf pun memang sebagai wakil.

"Jadi tidak ada masalah dengan survei seperti itu. Wapres tetap konsen bekerja, alhamdulillah beliau makin sehat dan langsing. Mudah-mudahan kalau Covid-19 bisa makin reda, kalau tancap gasnya 60-70 nanti bisa 80-90," katanya.

Masduki menekankan, paling penting saat ini adalah Wapres Ma'ruf selalu menjunjung tinggi secara maksimal bahwa ia serius membantu kinerja Presiden. Bahkan belum lama ini,

Wapres Ma'ruf juga berangkat ke beberapa daerah untuk berbagi tugas dengan Jokowi. Terbaru adalah saat Ma'ruf pergi ke Sumatera Barat dan Jokowi pergi ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Artinya selalu berbagi antara Presiden dan Wapres. Sebelumnya Wapres datang ke Kalimantan Tengah meresmikan bandara di Muara Tehew. Di saat yang sama, Presiden juga meresmikan bandara di Ambon," kata dia.

"Wapres selalu maksimal membantu Presiden dan tentu saja kapasitasnya sebagai ban serep. Tidak mungkin jadi satu," lanjut Masduki. ● han

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburrokhman mengatakan, kader di partainya ingin Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hanya saja, Prabowo belum memutuskan soal hal itu.

"Kader Gerindra tentu kami sangat ingin beliau kembali nyapres, tapi belum ada keputusan apapun soal itu karena tetap harus dengan persetujuan beliau," kata Waketum Gerindra Habiburrokhman, Senin (12/4).

Survei yang diterbitkan Lembaga Survei KedaiKOPI menyebutkan, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tinggi, bahkan melebihi tokoh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Habiburrokhman, Prabowo memiliki elektabilitas tinggi dalam survei karena publik mengapresiasi kerjanya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan elemen pemerataan bangsa.

Dia juga mengatakan partainya tidak akan terlalu reaktif dalam menanggapi hasil survei yang ada. "Sebagian besar masyarakat sudah move on dari polarisasi 2019, Pak Prabowo bekerja semaksimal mungkin menjadi elemen pemersatu bangsa," ujar Habiburrokhman.

Sebelumnya, Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia

(KedaiKOPI) mencatat elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungguli Presiden Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei di kategori elektabilitas terbuka terkait tokoh yang cocok menjadi presiden di tahun 2024.

Kunto Adi Wibowo mengatakan survei dilakukan kepada 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia pada 29 Maret hingga 4 April 2021. Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon. Responden diberikan pertanyaan soal siapa nama tokoh yang menurut anda layak menjadi presiden di 2024.

"Muncul beberapa nama, yang di atas, Pak Prabowo Subianto, lalu Joko Widodo juga masih muncul, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono," kata Kunto dalam diskusi virtual, Senin (12/4).

Prabowo Subianto unggul dengan persentase 24,5 persen, kemudian diikuti nama Joko Widodo dengan angka 18,5 persen, lalu Ganjar Pranowo dengan angka 16,0 persen. Selanjutnya, nama Ridwan Kamil muncul dengan angka 13,3 persen, serta Anies Baswedan menyusul dengan angka 12,5 persen. ● han

PENGUMUMAN Untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tegihan Tertentu Yang Dibuat...

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT UTAMA KREATIF MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Utara...

PENGUMUMAN Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA...

PENGUMUMAN Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LLOYD PHARMA INDONESIA...

PENGUMUMAN Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat 7 dan 8 juncto Pasal 127 ayat 8 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT.PANGKAR BEGLI, berkedudukan di Kota Pontianak...

PENGUMUMAN Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LLOYD PHARMA INDONESIA...



AKSI DAMAI FORUM SOLIDARITAS MAHASISWA PAPUA MAJU

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Maju melakukan aksi damai di sekitar area Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/4). Dalam aksi itu mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah diantaranya efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) secara transparan, menyambut kebijakan investasi dengan memperhatikan masyarakat adat dan nilai-nilai budaya Papua, serta mendukung kehadiran TNI/Polri untuk mengamankan wilayah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Denny Indrayana Ungkap Dugaan Politik Uang di Pilgub Kalsel

JAKARTA (IM) - Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana mengungkap adanya dugaan praktik politik uang dalam proses menjelang pemungutan suara ulang pemilihan gubernur (Pilgub) Kalsel tahun 2020. Hal itu ia ungkapkan usai melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (12/4).

"Tadi kami diterima oleh Komisioner Ibu (Ratna) Dewi. Kami memberikan informasi, situasi di Kalimantan Selatan yang semakin tidak kondusif, terkait dengan prinsip pemilu jujur dan adil," kata Denny melalui siaran di akun Facebook-nya.

Adapun dugaan politik uang yang dimaksud Denny antara lain pembagian sembako hingga pemborongan dagangan di pasar. Kemudian kepala desa digaji Rp 5 juta per bulan, Rukun Tetangga (RT) Rp 2,5 juta per bulan selama rentang periode pemungutan suara ulang yang akan digelar 9 Juni 2021. "Saya sudah ketemu den-

gan beberapa RT di beberapa wilayah, mengkonfirmasi itu. Tujuannya nanti mereka mercurt suara-suara pemilih," ujarnya.

Lalu ada juga modus politik uang dengan menempelkan stiker yang bertuliskan angka jumlah penghuni rumah untuk selanjutnya diberi uang. Serta adanya kepala dinas yang dikumpulkan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

"Kiranya nanti ada tim lain yang turun dengan uang pada gilirannya untuk memberikan pembelian suara kepada rumah-rumah yang sudah ditempelin stiker itu. Ini sebenarnya modus lama," ungkapnya.

Namun, menurut Denny, walau sudah terlihat jelas, Bawaslu Kalimantan Selatan justru tidak melakukan tindakan apapun. Padahal, seharusnya Bawaslu dia nilai bisa mengambil tindakan tanpa harus ada laporan terlebih dahulu.

"Jadi saya memberikan warning kepada Bawaslu jangan dibiarkan dong sambil saja mengambil langkah," ucapnya. ● mei

PENGUMUMAN Proses likuidasi PT. PRIMA TUNGGAL CIPTA INDONESIA (dalam likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan) telah selesai dilaksanakan, pemegang saham Perseroan telah menerima Laporan Pertanggungjawaban Likuidator dan memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tanggal 06 April 2021.

PENGUMUMAN Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan, tertanggal 28 Desember 2020 juncto 08 April 2021, yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 12 April 2021 Nomor 27, dibuat di hadapan Dini Lestari Siburjan, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diputuskan bahwa PT KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") menurunkan nilai nominal dari semua sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham, sehingga merubah Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor "Perseroan" dari semula sebesar Rp 500.000.000,000 (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 50.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah).

Moeldoko Sebut TMII akan Dijadikan Tempat Berkumpulnya Inovator Muda

JAKARTA (IM) - Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekretneq) resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. Bersamaan dengan itu, Kemensekretneq membuka kanal aspirasi publik sebagai wadah penyampaian masukan dalam pengelolaan obyek tersebut ke depan.

"Kemensekretneq akan memfasilitasi penyerapan aspirasi publik terkait pengembangan dan pengelolaan TMII ke depan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen untuk meningkatkan perbaikan pengelolaan aset negara, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah," kata Kabiro Humas Kemensekretneq, Eddy Cahyono Sugiarto, Senin (12/4).

Kemensekretneq, kata Eddy, telah membuka kanal partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pengelolaan TMII ke depan, yang dapat disampaikan melalui kanal media Kemensekretneq (email: humas@setneg.go.id, Instagram, Twitter, dan Facebook).

Kemensekretneq menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya melalui Kanal Aspirasi TMII, antara lain harapan agar pengelolaan TMII ke depan berbasis konsep 4.0, edukasi nusantara yang dikemas lebih modern, melibatkan partisipasi budayawan, seniman, duta wisata, dan duta budaya, perbaikan sarana dan prasarana serta lebih memperhatikan lingkungan.

"Diharapkan masyarakat luas dapat terus memberikan masukan melalui Kanal Aspirasi TMII yang ada, sehingga dapat mengakselerasi penca-

paian Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, sarana wisata edukasi bermatra budaya Nusantara, mempertebal rasa cinta tanah air, dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa," ucap Eddy.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan TMII resmi berpindah ke negara usai dipegang Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun. Yayasan tersebut didirikan mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto.

Dasar hukum pengambilalihan TMII yakni Perpres 19/2021. Isi beleid itu menyanjur isi Kepres Nomor 51 Tahun 1977 yang menjadi dasar hukum Yayasan Harapan Kita mengelola TMII selama ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, gambaran Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke depannya setelah diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah. Menurut dia, nantinya TMII akan dijadikan pusat berkumpulnya para inovator-inovator muda di berbagai bidang, mulai dari sosial budaya hingga teknologi.

Pernyataan itu disampaikan Moeldoko di sela-sela kunjungannya di TMII, Jakarta Timur, Senin (12/4) siang. "Dalam bayangan kita semuanya, ke depan kita berharap TMII bisa menjadi tempat berkumpulnya inovator muda, di bidang sosial, budaya dan bahkan inovator teknologi ya," ungkapnya.

Selain itu, para inovator akan diberikan ruang seluas dan sebebas-bebasnya untuk berkreasi. Sehingga, pada nantinya akan berdampak pada pembangunan Indonesia di masa depan.

PENGUMUMAN Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat 7 dan 8 juncto Pasal 127 ayat 8 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT.PANGKAR BEGLI, berkedudukan di Kota Pontianak... Pontianak, 13 April 2021 DIREKSI

PENGUMUMAN Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT UTAMA KREATIF MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Utara... Jakarta, 13 April 2021

PENGUMUMAN PT LLOYD PHARMA INDONESIA (Perseroan) berkedudukan di Kota Tangerang telah melakukan konversi utang Perseroan kepada para pemegang saham yaitu MNB HOLDING Pte. Ltd, YULIUS LEONANTO SNI dan M.K.N., Notaris di Kota Tangerang... Jakarta, 13 April 2021

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PERMA PLASINDO berkedudukan di Jakarta Utara... Jakarta, 13 April 2021

PENGUMUMAN Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PERMA PLASINDO berkedudukan di Jakarta Utara... Jakarta, 13 April 2021